

# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023**



## Kata Pengantar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan 2023 yang akan menjadi bagian dari rancangan dokumen perencanaan perubahan Renja Murni Tahun 2023 yang sudah disusun sebelumnya.

Renja Perubahan DLH Kota Balikpapan Tahun 2023 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 yang sudah dicapai sampai dengan Triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan DLH Kota Balikpapan Tahun 2023. Renja Perubahan DLH Kota Balikpapan Tahun 2023 sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur DLH Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Balikpapan, 10 Agustus 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Balikpapan,



**SUDIRMAN DJAYALEKSANA**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	ii
Daftar Isi	.....	iii
Daftar Tabel	.....	iv
Bab I	Pendahuluan	..... 1
	1.1 Latar Belakang	..... 1
	1.2 Landasan Hukum	..... 2
	1.3 Maksud dan Tujuan	..... 3
	1.4 Sistematika Penulisan	..... 3
Bab II	Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan	..... 4
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DLH Kota Balikpapan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup	..... 4
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	..... 17
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH Kota Balikpapan	..... 18
	2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	..... 21
Bab III	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	..... 23
Bab IV	Penutup	..... 40
	4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	..... 40
	4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan	..... 40
	4.3 Rencana Tindak Lanjut	..... 41

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kota Balikpapan	5
Tabel	2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja DLH sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 (Tahun Berjalan) Kota Balikpapan	6
Tabel	2.3	Tujuan dan Sasaran DLH di Renstra DLH 2021-2026	17
Tabel	2.4	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Triwulan II	18
Tabel	2.5	Pemetaan Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup	19
Tabel	3.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Balikpapan Dinas Lingkungan Hidup	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penggunaan anggaran perubahan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2023. Dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah periode 2021 – 2026.

Renja Perubahan DLH Kota Balikpapan Tahun 2023 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan

dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan DLH Kota Balikpapan Tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;

8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023, antara lain :

1. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan DLH Kota Balikpapan tahun 2023;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2023.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penyusunan dari Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 meliputi :

- BAB I :PENDAHULUAN
- BAB II :EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- BAB III :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV :PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DLH Kota Balikpapan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup**

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2016 adalah:

**“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”**

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ada pada Visi Nyaman Dihuni dengan isu strategis Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sedangkan pada misi yang terkait adalah misi keempat, yaitu :

**“Mewujudkan Kota Nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan”**

Visi dan misi tahun 2021 - 2026 yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Balikpapan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota



Balikpapan dalam waktu lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kota Balikpapan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Tujuan Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,07	68,15	68,23	68,31	68,41	68,51	68,51
	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,33	65,33	65,33	65,33	65,43	65,53	65,53
	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,92	89,02	89,12	89,22	89,32	89,42	89,42
	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	47,22	47,32	47,42	47,52	47,62	47,72	47,72
	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81,12	81,15	81,18	81,2	81,22	81,24	81,24
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DLH Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	N/A	27	28,75	30,05	32,25	34	34

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja DLH sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 (Tahun Berjalan) Kota Balikpapan**

No	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Penjelasan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3	4		5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		17		
			Nilai	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai		98,846,297,400	77.66	15,542,607,965	77.66	19,614,822,800	0	3,281,518,474		4,714,891,958		7,996,410,432	50%	26%	78	23,539,018,397	0.00%	15.53%	Target realisasi capaian kinerja di Triwulan IV		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	75	250,000,000			72	14,975,000	0	-		0		-	25%	0%	0	-	0.00%	0.00%	Kegiatan masih berjalan sampai dengan Triwulan IV dari tiap-tiap sub kegiatan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan					1	5,000,000	0	-		0		-	0%	0%	0	-	0.00%	0.00%	Kegiatan akan dilaksanakan pada T IV		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan					2	9,975,000	1	-		0		-	50%	0%	1	-	0.00%	0.00%	LPPD DLH pada T I dan LAKIP pada T VI		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	80.09	64,317,897,400	2	10,667,338,478	78.59	13,057,363,000	0	2,538,597,349		3,611,413,769		6,150,011,118	100%	47%	2	16,817,349,596	2.50%	26.15%	Kegiatan masih berjalan sampai dengan Triwulan IV dari tiap-tiap sub kegiatan		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang					12	10,667,338,478	75	13,057,363,000	75	2,538,597,349	0	3,611,413,769	75	6,150,011,118	100%	47%	87	16,817,349,596	0.00%	0.00%	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN rutin per bulan sd T IV
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Retribusi Perangkat Daerah	Nilai	83.56	8,250,000,000	1	1,347,997,052	82.06	1,500,000,000	0	151,175,339		247,389,693		398,565,032	0%	0%	1	1,746,562,084	1.20%	21.17%	Kegiatan masih berjalan sampai dengan Triwulan IV dari tiap-tiap sub kegiatan		
	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah	dokumen			23	1,347,997,052	1	1,500,000,000	0	151,175,339		247,389,693	0	398,565,032	0%	27%	23	1,746,562,084	0.00%	0.00%	Pendaftaran objek, subjek dan wajib retribusi daerah berlangsung rutin sd T IV		

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	80.43	803,250,000	75	37,500,000	78.93	50,000,000	0	-	-	-	5%	0%	75	37,500,000	93.25%	4.67%	Kegiatan masih berjalan sampai dengan Triwulan IV dari tiap-tiap sub kegiatan		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	orang			75	37,500,000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	75	37,500,000	0.00%	0.00%	Sub Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2023		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang			20	50,000,000	0	-	2	-	2	-	10%	0%	2	-	0.00%	0.00%	Pelaksanaan diklat sesuai jadwal dari KI.HK/PSLH		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	76.61	5,233,710,000	20	797,651,102	75.11	1,138,332,900	19	139,834,722	15	139,715,433	66%	32%	20	1,077,201,257	26.11%	20.58%	Kegiatan masih berjalan ada yang berjalan sampai dengan Triwulan IV dari 4 (empat) sub kegiatan		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket			5	7,277,300	5	8,000,000	4	6,775,000	0	-	4	6,775,000	80%	85%	9	14,052,300	0.00%	0.00%	Seluruh paket pekerjaan harus selesai di T II, masih ada 1 (satu) paket yang sedang berproses
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket			5	325,760,000	8	215,337,900	2	17,300,000	5	3,880,000	7	21,180,000	88%	10%	12	346,940,000	0.00%	0.00%	Seluruh paket pekerjaan seharusnya selesai di T I, masih ada 1 (satu) paket yang sedang berproses
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket			5	197,667,300	6	219,995,000	2	37,524,600	4	23,656,700	6	61,181,300	100%	28%	11	258,848,600	0.00%	0.00%	Pelaksanaan pekerjaan ada yang sampai bulan Desember 2023 (T IV)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket			4	34,190,000	4	45,000,000	2	16,363,000	2	2,919,200	4	19,282,200	100%	43%	8	53,472,200	0.00%	0.00%	Pelaksanaan pekerjaan ada yang sampai bulan Desember 2023 (T IV)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			94	232,756,502	140	600,000,000	30	61,872,122	12	109,259,533	42	171,131,655	30%	29%	136	403,888,157	0.00%	0.00%	Pelaksanaan perjalanan dinas sampai T IV
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			1	50,000,000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	-	0.00%	0.00%	Pekerjaan masih dalam proses penyelesaian, kontrak ad bulan Juli 2023		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	73.82	2,310,000,000	4	216,445,000	72.32	99,890,000	0	-	0	46,550,000	67%	31%	4	262,995,000	5.42%	11.39%	Target realisasi capaian kinerja di Triwulan IV		

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan	Unit			1					167,500,000	0	-	-	0	-	0	0%	0%	1	167,500,000	0.00%	0.00%	Sub Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2023	
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit			3					48,945,000	10	49,890,000	10	-	0	46,550,000	100%	93%	13	95,495,000	0.00%	0.00%	Pelaksanaan pekerjaan telah selesai	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit									2	50,000,000	0	-	2	-	100%	0%	2		0.00%	0.00%	Pelaksanaan pekerjaan telah selesai	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	81.13	9,198,440,000	9					1,566,614,099	79.63	1,739,996,000	0	309,447,189	0	400,579,400		83%	60%	9	2,276,640,688	11.09%	24.75%	Target realisasi capaian kinerja di Triwulan IV
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan			2					8,304,000	2	10,000,000	1	9,660,000	0	-	1	50%	97%	3	17,964,000	0.00%	0.00%	Pelaksanaan pekerjaan penyediaan jasa surat menyurat sd T IV
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan			6					441,401,938	6	499,996,000	3	87,545,877	3	126,239,532	100%	43%	12	655,187,347	0.00%	0.00%	Pelaksanaan pekerjaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sampai dengan T IV	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan			25					1,116,908,161	8	1,230,000,000	3	212,241,312	5	274,339,868	100%	40%	33	1,603,489,341	0.00%	0.00%	Pelaksanaan pekerjaan penyediaan jasa umum sampai dengan T IV	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	74.87	8,483,000,000	6					909,062,234	73.37	2,014,265,900	0	142,463,875	0	269,243,663		55%	39%	6	1,320,769,772	8.01%	15.57%	Target realisasi capaian kinerja di Triwulan IV
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit			46					717,177,969	71	1,820,285,900	3	142,463,875	26	169,285,063	29	41%	17%	75	1,028,926,907	0.00%	0.00%	Pelaksanaan pekerjaan sampai dengan T IV
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit								-	100	93,980,000	25	-	0	-	25	25%	0%	25		0.00%	0.00%	Pelaksanaan pekerjaan sampai dengan T IV
	Pemeliharaan/Rchabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			8					191,884,265	1	100,000,000	1	-	0	99,958,600	1	100%	100%	9	291,842,865	0.00%	0.00%	Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana triwulan

2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	persen	100	1,610,000,000	35.29	98,134,980	50	1,454,998,700	0.00	23,619,974	0.00	41,494,787	65,114,761	0%	4%	35	163,249,741	35.29%	9.76%	Target realisasi capaian kinerja di Triwulan IV	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen RPPLH yang menjadi acuan lingkungan hidup	Dokumen	8	1,080,000,000	1	98,134,980	1	604,998,700	0	7,729,386	0	11,579,481	19,308,867	0%	3%	1	117,443,847	12.50%	10.87%	Kegiatan masih berjalan sampai dengan Triwulan IV	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	Dokumen			1	98,134,980	1	604,998,700	0	7,729,386	0	11,579,481	0	19,308,867	0%	3%	1	117,443,847	0.00%	0.00%	Dokumen selesai SPK di bulan November 2023
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan lingkungan hidup	Dokumen	8	530,000,000			2	850,000,000	0	15,890,588	0	29,915,306	45,805,894	0%	6%	0	45,805,894	0.00%	8.64%	Kegiatan masih berjalan sampai dengan Triwulan IV dari tiap-tiap sub kegiatan	
	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RRPJPD/ RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RRPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang disusun	Dokumen					2	825,000,000	0	14,442,588	0	29,915,306	0	44,357,894	0%	5%	0	44,357,894	0.00%	0.00%	Dokumen selesai SPK di bulan Oktober 2023
	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/ Kota yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Dokumen					1	25,000,000	0	1,448,000	0	-	0	1,448,000	0%	6%	0	1,448,000	0.00%	0.00%	Target realisasi capaian kinerja di Triwulan IV
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persen	100	12,130,000,000	64	957,276,659	100	2,552,791,650	0	33,759,636	43.5	189,317,391	223,077,027	13.89%	7.28%	64	1,180,353,686	64.00%	8.15%	Target realisasi capaian kinerja di Triwulan IV	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Akumulasi upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota	kegiatan	116	2,920,000,000	65	116,434,165	23	1,419,141,000	0	12,263,030	10	29,686,642	41,949,672	17%	9%	65	158,383,837	56.14%	5.42%	Target realisasi capaian kinerja di Triwulan III dan IV	

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Dokumen			56																			Dokumen lingkungan (Amdal dan UKL-UPJ) yang diproses dan mendapatkan Persetujuan Lingkungan sd T II telah mencapai 50% dari target. Rencana kegiatan sosialisasi untuk kegiatan Persetujuan Lingkungan direncanakan pada T III
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen			2																			Pelaksanaan penyusunan PEP Gas Rumah Kaca mengacu Dokumen RAD GRK Kota Balikpapan berjalan sd T IV
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan contoh Uji, Pengujian parameter kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	Dokumen																						Pelaksanaan Penyusunan Kajian Labling dan pemeliharaan unit alat ESTB pada T III.
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan	41	7,750,000,000	50																			Kegiatan masih berjalan sumpai dengan Triwulan IV dari tiap-tiap sub kegiatan
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup pada masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Laporan			3																			Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan pada T II; dan Pemantauan kualitas air sungai telah dilaksanakan 1 kali pada T II serta akan dilaksanakan untuk pemantauan kualitas air ke 2 pada TIII
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	Titik																						Pelaksanaan pekerjaan pendukung upaya penghentian kejadian pencemaran; dan berjalan sd T IV (tergantung kejadian pencemaran lingkungan)

	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/ Kerusakan Lingkungan	Kegiatan	21	1,460,000,000	25		97,498,280	4	146,970,650	0	6,483,480	0.00	860,000		7,343,480	0%	4%	25	104,841,760	119.05 %	7.18%	Kegiatan masih berjalan sampai dengan Triwulan IV dari tiap-tiap sub kegiatan
	Koordinasi, Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Sektor Lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	Dokumen			3			2	36,970,800	0	3,064,320	0		0	3,064,320	0%	8%	3	3,064,320	0.00%	0.00%	Pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan pada T III
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen			3		97,498,280	3	109,999,850	0	3,419,160	0	860,000	0	4,279,160	0%		3	101,777,440	0.00%	0.00%	Pelaksanaan pekerjaan selesai pada bulan November 2023 (T IV)
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase RTH yang dikelola	Persen	10.65	192,525,000,000	5.74		26,840,553,411	10.59	58,180,667,500	3	3,841,255,216	0.00	6,830,087,292		10,675,831,708	0%	12%	6	37,516,385,119	53.90%	19.49%	Target realisasi capaian kinerja di Triwulan IV
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan tutupan lahan yang menjadi tanggung jawab Kota	Hektar	6,802.43	192,525,000,000	111		26,840,553,411	6802.43	58,180,667,500	0	3,841,255,216	0	6,830,087,292		10,675,831,708	0%	12%	111	37,516,385,119	1.63%	19.49%	Kegiatan masih berjalan sampai dengan Triwulan IV dari tiap-tiap sub kegiatan
	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen						1	300,000,000	0	4,489,200	0	1,143,600	0	5,632,800	0%		0	5,632,800	0.00%	0.00%	Dokumen selesai SPK di bulan November 2023
	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	Ha			309.22		2,516,284,634	309.22	3,379,940,000	0	383,057,672	0	709,960,679	0	1,093,018,351	0%	32%	309	3,609,302,985	0.00%	0.00%	Target realisasi capaian kinerja di Triwulan IV
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha			390.46		24,324,268,777	390.46	54,400,727,500	0	3,458,197,544	0	6,118,014,013	0	9,576,211,557	0%	18%	390	33,900,480,334	0.00%	0.00%	Target realisasi capaian kinerja di Triwulan IV
	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	orang						15	100,000,000	0		0	969,000	0	969,000	0%	0%	0	969,000	0.00%	0.00%	Belum terlaksana, direncanakan di Triwulan IV

5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentase usaha/kegiatan penghasilan limbah B3 yang melaporkan limbahnya	persen	76.32	2,030,000,000	24.48	48,367,415	44.74	580,000,000	0.00	4,717,911	14,486,585	19,204,496	20%	2%	24	67,571,911	32.08%	6.72%	Target realisasi capaian kinerja di Trivulan IV		
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan Limbah B3	Usaha/kegiatan	95	405,000,000	12	48,367,415	20	55,000,000	0	1,731,700	8	-	1,731,700	40%	3%	12	50,099,115	12.63%	12.37%	Target realisasi capaian kinerja di Trivulan III	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi Persetujuan/Izin in penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dokumen			12	48,367,415	10	55,000,000	0	1,731,700	4	-	4	1,731,700	40%	3%	16	50,099,115	0.00%	0.00%	Pelaksanaan pekerjaan untuk pelayanan Rincian Teknis Penyimpanan LEB dan pengelolaan LB3 dari rumah tangga, target pelaksanaan pekerjaan selesai pada T III
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan pengumpulan Limbah B3	Usaha/kegiatan	15	1,625,000,000		-	3	525,000,000	0	2,986,211	0	14,486,585		0%	0%	0	17,472,796	0.00%	1.08%	Target realisasi capaian kinerja di Trivulan III	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengolahan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, Pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota	Dokumen				-	3	525,000,000	0	2,986,211	0	14,486,585	0	17,472,796	0%		0	17,472,796	0.00%	0.00%	Saat ini sedang berproses surat dari Plh Sekda untuk meminta klarifikasi pemanfaatan sarpras DAK Covid 19 ke KLHK; target realisasi pelaksanaan pekerjaan pada T III
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	persen	34.15	1,905,000,000	40.36	99,380,030	29.27	194,017,100	1.71	7,849,450	11.71	39,868,400	47,717,850	31%	19%	40	147,097,880	118.18 %	7.72%	Target realisasi capaian kinerja di Trivulan IV	



	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang memenuhi persyaratan lingkungan	kegiatan	710	1,905,000,000	111															99,380,030	120	194,017,100	7	7,849,450	48	39,868,400	47,717,850	31%	19%	111	147,097,880	15.63%	7.72%	Kegiatan masih berjalan sampai dengan Triwulan IV dari tiap-tiap sub kegiatan		
	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen			80															74,673,430	85	73,457,100	7	7,399,450	32	17,937,000	39	25,336,450	46%	34%	119	100,009,880	0.00%	0.00%	Pelaksanaan fasilitasi berjalan sesuai target triwulan dan kegiatan ini akan berjalan sd T IV	
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Orang																				4		0	0		0		0%		0		0.00%	0.00%	Pelaksanaan kegiatan tergantung dari Balai Gakkum KLHK	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diajari Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan			31																24,706,600	35	95,560,000	0	450,000	16	21,931,400	16	22,381,400	46%	23%	47	47,088,000	0.00%	0.00%	Pengawasan Izin Lingkungan/PPLH telah dilaksanakan sesuai target per triwulan dan kegiatan ini akan berjalan sd T IV
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	persen	100	3,895,000,000	61.15																264,276,759	100	569,997,700	17.74	26,400,000	5843.55	46,551,900	72,951,900	953%	10%	61	337,228,659	61.15%	8.66%	Target realisasi capaian kinerja di Triwulan IV	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Kegiatan	310	3,895,000,000	159																264,276,759	62	569,997,700	11	26,400,000	3623	46,551,900	72,951,900	953%	10%	159	337,228,659	51.29%	8.66%	Kegiatan masih berjalan sampai dengan Triwulan IV dari tiap-tiap sub kegiatan	

	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institutasi yang Meringkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	lembaga			32															91,862,459	32	309,999,800	8	26,400,000	17	34,806,500	25	61,206,500	78%	20%	57	153,068,959	0.00%	0.00%	Peningkatan kapasitas untuk sekolah yang diusulkan menjadi calon Adiwiyata tingkat Provinsi, Program Kampung Iklim dengan 1 Kelurahan (Proklam Lestari) dan 10 Kelurahan binaan Proklam. Target kinerja T III dan IV untuk sekolah Adiwiyata yang saat ini sedang proses verifikasi menjadi calon sekolah Adiwiyata Mandiri (penilaian oleh KLHK)
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen			132															90,314,400	30	109,999,700	1	-	140	11,745,400	14 1	11,745,400	470%	11%	273	102,059,800	0.00%	0.00%	Pendampingan untuk perpanjangan sekolah Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata (85 sekolah) dan usulan sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi (55 sekolah)
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	Orang			18															82,099,900	150	149,998,200	2	-	3466	-	34 68	-	2312%	0%	3,486	82,099,900	0.00%	0.00%	Bimtek Integrasi RPP untuk Gerakan PBLHS (300 orang) dan publikasi/ penyuluhan melalui media elektronik (media sosial IG DLH) dengan merujuk review dari bahan sosialisasi elektronik yang dipublikasikan (5166 orang)
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	persen	100	1,650,000,000	20.00															166,230,600	100	247,519,700	0.00	6,600,000	30.77	16,153,300		22,753,300	200%	9%	20	188,983,900	20.00%	11.45%	Target realisasi capaian kinerja di Triwulan IV
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	penghargaan	138	1,650,000,000	26															166,230,600	26	247,519,700	0	6,600,000	8	16,153,300		22,753,300	200%	9%	26	188,983,900	18.84%	11.45%	Kegiatan masih berjalan sampai dengan Triwulan IV dari tiap-tiap sub kegiatan
	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas			4															166,230,600	4	247,519,700	0	6,600,000	8	16,153,300	8	22,753,300	200%	9%	12	188,983,900	0.00%	0.00%	Penilaian untuk Data Lingkungan Kota Balikpapan sebanyak 6 orang dan usulan warga Kalpataru sebanyak 2 orang pada T II (melebihi target kinerja pada Renja)

9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang terealisasi	persen	100	1,175,000,000	152	98,181,785	100	124,602,950	26.6667	-	26.6667	20,430,800	20,430,800	53%	16%	152	118,612,585	152.00%	10.09%	Target realisasi capaian kinerja di Triwulan IV	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	persen	100	1,175,000,000	106	98,181,785	100	124,602,950	26.6667	-	26.6667	20,430,800	20,430,800	53%	16%	106	118,612,585	106.40%	10.09%	Kegiatan masih berjalan sampai dengan Triwulan IV dari tiap-tiap sub kegiatan	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	Dokumen			38	98,181,785	30	124,602,950	8	-	8	20,430,800	16	20,430,800	53%	16%	54	118,612,585	0.00%	0.00%	Pengaduan masuk melalui surat dan/atau elektronik (berita, media sosial, informasi warga masyarakat) yang ditangani dengan keterlibatan para pihak dalam penanganannya, sesuai dengan jenis permasalahan pengaduan
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	Persen	100	392,083,044,600	81.15	83,000,860,530	99	64,569,039,500	24.75	13,512,802,831	44.90	21,013,985,055	34,526,787,886	29%	22%	81	117,527,648,416	81.15%	30.06%	Target realisasi capaian kinerja di Triwulan IV	
	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani	Ton	1,045,799	391,023,044,600	99	83,000,860,530	174106.6	64,569,039,500	43526.65	13,512,802,831	78059.23	21,013,985,055	34,526,787,886	29%	22%	99	117,527,648,416	0.01%	30.06%	Kegiatan masih berjalan sampai dengan Triwulan IV dari tiap-tiap sub kegiatan	
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten /Kota yang Disusun dan Ditetapkan	dokumen			6	106,501,000	1	150,000,000	0	17,185,050	0	-	0	17,185,050	0%	11%	6	123,686,050	0.00%	0.00%	Dokumen money Jakstrada akan terealisasi pada T IV, yang merupakan akumulasi monev sepanjang tahun untuk penanganan dan pengurangan sampah kota dan diperlukan melalui aplikasi SIPSN KLHK
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	jumlah kelompok yang dibina	laporan			4	45,577,550		-		-		0	-	0%		4	45,577,550	0.00%	0.00%	Sub Kegiatan ini tidak ada pada tahun 2023	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton			134.59	63,426,616,575	140293.9	58,919,039,500	35073.48	11,437,053,067.00	78059.23	16,915,723,149	113133	28,352,776,216	81%	48%	113,267	91,779,392,791	0.00%	0.00%	Volume sampah yang terangkut dari TPA sampai ke TPA. Volume sampah ini merupakan nilai akumulasi penanganan sampah pada T II dan terdata melalui pencatatan pada jembatan timbang di TPAS Manggar

Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (TPAS Manggar)	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton				140293.9	12,225,787,341	35073.48	1,856,334,546	78059.23	2,879,725,906	113133	4,736,060,452	81%	39%	113,133	4,736,060,452	0.00%	0.00%	Volume sampah yang tertangani dengan proses sanitary landfill di TPA (terolah) dan diminimalisasi melalui pemilahan dengan proses pengomposan dan pengolahan Bahan Bakar Jumpsutan Padat
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	6.00	28,579,700.00	8	300,000,000	0	-	0	20,160,000.00	0	20,160,000	0%	7%	6	48,739,700	0.00%	0.00%	Sesuai rencana kerja akan dilaksanakan pada T III pada kelurahan calon lokasi Pusat Daur Ulang (3 kelurahan dan 3 KSM	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	300	19,393,585,705	15	5,200,000,000	0	202,230,168	2	1,198,376,000.00	2	1,400,606,168	13%	27%	302	20,794,191,873	0.00%	0.00%	2 (dua) unit tangki sudah terealisasi sesuai dokumen kontrak. 5 (lima) unit pick up dan 1 (satu) unit compactor akan terealisasi pada awal Triwulan III; 7 (tujuh) unit kontainer akan terealisasi pada bulan Oktober (Triwulan IV). Jadwal realisasi sesuai dokumen kontrak	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>													<b>95.04%</b>	<b>1465.83%</b>		<b>15.63%</b>	<b>4.84%</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>													<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>		<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>			
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN</b>													<b>111.08%</b>	<b>27.00%</b>		<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>			
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN</b>													<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Rendah</b>		<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>			
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN</b>													<b>95.81%</b>	<b>16.62%</b>		<b>663.65%</b>	<b>14.41%</b>			
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN</b>													<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Rendah</b>		<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Rendah</b>			
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>													<b>135.04%</b>	<b>12.89%</b>		<b>61.77%</b>	<b>12.76%</b>			
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>													<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Rendah</b>		<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>			

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan membantu Wali Kota Balikpapan dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada :

- Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**

Tujuan dan Sasaran DLH di Renstra DLH 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatkan Upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Indeks Kualitas Lahan	1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan
2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase indeks kualitas air dan indeks kualitas udara	2. Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air
		3. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah partisipasi masyarakat	4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	- persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH - persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan
4. Meningkatkan Kebersihan Kota	persentase kenaikan tingkat pengelolaan	5. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	- Persentase Pengurangan Sampah

	sampah		- Persentase Penanganan Sampah
--	--------	--	--------------------------------

Sumber : DLH 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja DLH Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja DLH Kota Balikpapan Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023	
		TARGET	REALISASI
1	2	3	4
Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,33	-
Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,02	-
Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	47,32	-
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81,15	-
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DLH Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	27	-

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa belum ada realisasi terhadap target pada indikator sasaran yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan indikator tersebut baru dapat direalisasikan pada triwulan III dan IV tahun 2023.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH Kota Balikpapan**

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan

yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu dilakukan untuk menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan.

Uraian permasalahan pembangunan yang diawali dengan analisis isu-isu strategis ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang menentukan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam kurun waktu 2021 - 2026. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dapat dilihat pada table di bawah.

**Tabel 2.5.**

**Pemetaan Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Permasalahan Lahan	Pengupasan Lahan yang tidak terkendali oleh pengembang / suatu kegiatan yang tidak sesuai aturan	Kurangnya pemahaman pengembang/suatu kegiatan akan prosedur/peraturan yang ada
	Tanah Hutan Kota yang diklaim milik masyarakat	Belum terdokumentasi dengan rapi data kepemilikan aset Pemkot
	Terjadinya bencana longsor	Kondisi Kota Balikpapan 85% perbukitan
	Migrasi satwa endemik di kawasan konservasi akibat pembangunan jalan	Belum adanya koridor satwa di daerah jalan penghubung
	Kerusakan mangrove	Kurangnya sapras dan SDM dalam pengawasan mangrove
	Banyaknya kawasan pinggir jalan yang perlu dibuat taman-taman untuk memperindah Kota	belum adanya identifikasi dan inventarisasi lokasi untuk pembuatan taman
	Tempat pemakaman umum di Kota telah penuh	Perlu pembebasan lahan untuk tempat pemakaman umum
Permasalahan Udara	Peningkatan Emisi kegiatan industri	Belum optimalnya penindakan dalam kegiatan industri yang

		mencemari udara
	Meningkatnya Penggunaan kendaraan bermotor	Belum adanya pembatasan dalam pengelolaan kendaraan bermotor
	Hasil pemantau kualitas udara tidak optimal	Perlu meningkatkan pengukuran kualitas udara, dengan mempertimbangkan waktu pemeliharaan
	Penurunan hasil kualitas udara ambien	Perlu evaluasi terhadap titik pantau lokasi kualitas udara ambien
Permasalahan Air	Meningkatnya Jumlah penduduk, Investasi usaha dan kegiatan sehingga permintaan air bersih bertambah	Percepatan pembangunan bangunan sumber air baku yang telah direncanakan
	Penurunan kualitas air pada badan air penerima/sungai	Meningkatnya aktifitas masyarakat dan usaha/kegiatan yang menghasilkan air limbah dan belum terkelola dengan baik
	Berkurangnya kapasitas drainase dikarenakan sedimen yang tinggi	Rutin melakukan pengerukan sedimen dan pembersihan sampah yang ada
	Usaha Ilegal di daerah aliran sungai	Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan secara tegas sesuai aturan yang berlaku
	Limbah cair domestik	Regulasi pengelolaan limbah cair domestik yang belum tersampaikan
Permasalahan Sampah	Kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam pemilahan dari sumber dan pengelolaan sampah	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah
	Belum tersediannya pusat daur ulang/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Keterbatasan anggaran dan SDM
	Kurang optimalnya pengelolaan Bank Sampah	Adanya kepentingan lain dalam pengelolaan Bank Sampah
	Kurangnya fasilitas Pemerintah berupa sarana dan prasarana pengelolaan sampah terutama sampah terpilah	Masih banyaknya fasilitas lama yang belum dihapuskan di aset sehingga menghambat penambahan fasilitas yang baru



	Meningkatnya sampah B3 rumah tangga	Belum ada regulasi dalam pengelolaan sampah B3 rumah tangga
	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah B3 rumah tangga	Kurang optimalnya sosialisasi pemilahan sampah B3 rumah tangga
	Kurangnya kesadaran masyarakat di Wilayah Pesisir dan Sungai	Kurangnya sosialisasi rutin pada masyarakat wilayah pesisir dan sungai
	Kurangnya sarana dan prasarana pengambilan sampah di pesisir dan sungai	Terkendala anggaran dalam pemenuhan prasaranan sampah pesisir dan sungai
	Beralihnya kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut ke pemerintah provinsi	Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sumber : Hasil Analisa

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah DLH Kota Balikpapan. Renja Perubahan DLH Tahun 2023 merupakan tahun pertama untuk RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026. Dalam perencanaan pembangunan Kota Balikpapan terdapat beberapa permasalahan utama yaitu sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang belum optimal;
2. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;
3. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi;
4. Belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan; serta
5. Belum optimalnya infrastruktur permukiman yang berkelanjutan.

Adapun prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik;
2. Percepatan pemulihan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing;

3. Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas;
4. Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan; serta
5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal.

Secara nasional, tema pembangunan tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan muatan lima arahan dan komitmen pemerintah, yakni kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional.

## **BAB III**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada perencanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 yang ditampilkan pada tabel 3.1 di bawah ini sesuai format dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di dalam website <https://balikpapan.sipd.kemendagri.go.id/>. Berikut disajikan rencana kerja perubahan beserta usulan pendanaan pagu indikatif .

**Tabel 3.1**

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kota Balikpapan Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>										159,293,784,941	165,544,316,541			163,223,000,000
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										19,614,822,800	19,874,378,800			19,768,000,000
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										14,975,000	14,975,000			35,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	77,66 Nilai	77,66 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	72 Nilai	72 Nilai	5,000,000	5,000,000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	10,000,000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	77,66 Nilai	77,66 Nilai	2 Laporan	2 Laporan	72 Nilai	72 Nilai	9,975,000	9,975,000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	25,000,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>13,057,363,000</b>	<b>13,057,363,000</b>	<b>12,835,500,000</b>		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	75 Orang/bulana	75 Orang/bulana	78.59 Nilai	78.59 Nilai	13,057,363,000	13,057,363,000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	12,835,500,000
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>										<b>1,500,000,000</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>1,700,000,000</b>		
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	IKM Layanan Administrasi Retribusi Perangkat Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	82.06 Nilai	82.06 Nilai	1,500,000,000	1,500,000,000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	1,700,000,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>250,000,000</b>		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	20 Orang	20 Orang	78.93 Nilai	78.93 Nilai	50,000,000	50,000,000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	250,000,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>1,138,332,900</b>	<b>1,445,454,300</b>	<b>1,160,000,000</b>		

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	5 Paket	5 Paket	75.11 Nilai	75.11 Nilai	8,000,000	8,000,000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	10,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	8 Paket	8 Paket	75.11 Nilai	75.11 Nilai	215,337,900	522,459,300	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	200,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	6 Paket	6 Paket	75.11 Nilai	75.11 Nilai	219,995,000	219,995,000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	250,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	4 Paket	4 Paket	75.11 Nilai	75.11 Nilai	45,000,000	45,000,000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	50,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	140 Laporan	140 Laporan	75.11 Nilai	75.11 Nilai	600,000,000	600,000,000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	500,000,000

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	75.11 Nilai	75.11 Nilai	50,000,000	50,000,000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	150,000,000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>99,890,000</b>	<b>162,964,300</b>	<b>175,000,000</b>		
Pengadaan Mebel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	10 Unit	10 Unit	72.32 Nilai	72.32 Nilai	49,890,000	112,964,300	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	75,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	2 Unit	2 Unit	72.32 Nilai	72.32 Nilai	50,000,000	50,000,000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	100,000,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>1,739,996,000</b>	<b>1,894,271,000</b>	<b>1,862,500,000</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	2 Laporan	2 Laporan	79.63 Nilai	79.63 Nilai	10,000,000	10,000,000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	12,500,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	6 Laporan	6 Laporan	79.63 Nilai	79.63 Nilai	499,996,000	499,996,000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	600,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	8 Laporan	8 Laporan	79.63 Nilai	79.63 Nilai	1,230,000,000	1,384,275,000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	1,250,000,000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>2,014,265,900</b>	<b>1,749,351,200</b>	<b>1,750,000,000</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	71 Unit	71 Unit	73.37 Nilai	73.37 Nilai	1,820,285,900	1,490,599,300	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	1,500,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	100 Unit	100 Unit	73.37 Nilai	73.37 Nilai	93,980,000	117,300,000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	100,000,000



Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Dirubah	IKM Layanan Pemeliharaan Boaring Milik nDyaarah Penunjang liUtarsuisan Pemerintahan Daerah	77,66 Nilai	77,66 Nilai	1 Unit	1 Unit	73.37 Nilai	73.37 Nilai	100,000,000	141,451,900	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	77,66 Nilai	150,000,000
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>										<b>1,454,998,700</b>	<b>1,454,998,700</b>	<b>1,130,000,000</b>		
<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>										<b>604,998,700</b>	<b>604,998,700</b>	<b>200,000,000</b>		
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan lingkungan hidup	50 %	50 %	2 Dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	604,998,700	604,998,700	Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan	50 %	200,000,000
<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>										<b>850,000,000</b>	<b>850,000,000</b>	<b>930,000,000</b>		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan lingkungan hidup	50 %	50 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	825,000,000	825,000,000	Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan	50 %	500,000,000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan lingkungan hidup	50 %	50 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	25,000,000	25,000,000	Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan	50 %	430,000,000

<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>											<b>1,532,331,650</b>	<b>2,552,791,650</b>		<b>2,175,000,000</b>
<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>											<b>398,681,000</b>	<b>1,419,141,000</b>		<b>800,000,000</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Akumulasi upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	100 Persen	100 Persen	20 Dokumen	20 Dokumen	23 Kegiatan	23 Kegiatan	98,681,250	98,681,250	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilaksanakan	100 Persen	150,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Akumulasi upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	3 Dokumen	23 Kegiatan	23 Kegiatan	99,999,750	1,120,459,750	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilaksanakan	100 Persen	150,000,000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Akumulasi upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	23 Kegiatan	23 Kegiatan	200,000,000	200,000,000	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilaksanakan	100 Persen	500,000,000

<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>											<b>986,680,000</b>	<b>986,680,000</b>	<b>1,050,000,000</b>		
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Upaya Penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	100 Persen	100 Persen	6 Laporan	6 Laporan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	936,680,000	936,680,000	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Yang Dilaksanakan	100 Persen	950,000,000	
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Yang Dilaksanakan	Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Upaya Penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	100 Persen	100 Persen	3 Titik	3 Titik	9 Kegiatan	9 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Yang Dilaksanakan	100 Persen	100,000,000	
<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>											<b>146,970,650</b>	<b>146,970,650</b>	<b>325,000,000</b>		

Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Persentase Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Jumlah upaya pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Kegiatan	4 Kegiatan	36,970,800	36,970,800	Persentase Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan	100 Persen	75,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah upaya pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan	100 Persen	100 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Kegiatan	4 Kegiatan	109,999,850	109,999,850	Persentase Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan	100 Persen	250,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>										<b>54,800,727,500</b>	<b>54,800,727,500</b>	<b>58,400,000,000</b>		
<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>										<b>54,800,727,500</b>	<b>54,800,727,500</b>	<b>58,400,000,000</b>		
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH yang dikelola	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Luas tutupan lahan yang menjadi tanggung jawab Kota	10,59 Persen	10,59 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	6802.43 hektar	6802.43 hektar	300,000,000	300,000,000	Persentase RTH yang dikelola	10,59 Persen	250,000,000

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas tutupan lahan yang menjadi tanggung jawab Kota	10,59 Persen	10,59 Persen	390.46 Ha	390.46 Ha	6802.43 hektar	6802.43 hektar	54,400,727,500	54,400,727,500	Persentase RTH yang dikelola	10,59 Persen	58,000,000,000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH yang dikelola	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Luas tutupan lahan yang menjadi tanggung jawab Kota	10,59 Persen	10,59 Persen	15 Orang	15 Orang	6802.43 hektar	6802.43 hektar	100,000,000	100,000,000	Persentase RTH yang dikelola	10,59 Persen	150,000,000
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>										<b>580,000,000</b>	<b>580,000,000</b>	<b>650,000,000</b>		
<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>										<b>55,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>100,000,000</b>		
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan limbahnya	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku Usaha yang melaporkan Limbah B3	44,74 Persen	44,74 Persen	10 Dokumen	10 Dokumen	20 usaha/kegiatan	20 usaha/kegiatan	55,000,000	55,000,000	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan limbahnya	44,74 Persen	100,000,000
<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>525,000,000</b>	<b>525,000,000</b>	<b>550,000,000</b>		

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan limbahnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan pengumpulan limbah B3	44,74 persen	44,74 persen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 usaha/kegiatan	3 usaha/kegiatan	525,000,000	525,000,000	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan limbahnya	44,74 persen	550,000,000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>										<b>194,017,100</b>	<b>335,097,100</b>	<b>475,000,000</b>		
<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>194,017,100</b>	<b>335,097,100</b>	<b>475,000,000</b>		
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Usaha yang memenuhi persyaratan lingkungan	29,27 persen	29,27 persen	85 Dokumen	85 Dokumen	120 Kegiatan	120 Kegiatan	73,457,100	73,457,100	Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	29,27 persen	175,000,000

Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Usaha yang memenuhi persyaratan lingkungan	29,27 persen	29,27 persen	4 Orang	4 Orang	120 Kegiatan	120 Kegiatan	25,000,000	25,000,000	Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	29,27 persen	50,000,000
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang memenuhi persyaratan lingkungan	29,27 persen	29,27 persen	35 Laporan	35 Laporan	120 Kegiatan	120 Kegiatan	95,560,000	236,640,000	Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	29,27 persen	250,000,000
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>										<b>569,997,700</b>	<b>1,565,589,300</b>	<b>1,075,000,000</b>		
<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>569,997,700</b>	<b>1,565,589,300</b>	<b>1,075,000,000</b>		
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	100 persen	100 persen	32 Lembaga	32 Lembaga	62 Kegiatan	62 Kegiatan	309,999,800	571,999,800	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	100 persen	250,000,000

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	100 persen	100 persen	30 Dokumen	30 Dokumen	62 Kegiatan	62 Kegiatan	109,999,700	832,671,300	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	100 persen	450,000,000
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	100 persen	100 persen	150 Orang	150 Orang	62 Kegiatan	62 Kegiatan	149,998,200	160,918,200	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	100 persen	375,000,000
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>										<b>247,519,700</b>	<b>247,519,700</b>	<b>400,000,000</b>		
<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>247,519,700</b>	<b>247,519,700</b>	<b>400,000,000</b>		
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembara Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	Jumlah Masyarakat/Lembara Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	4 Entitas	4 Entitas	26 Penghargaan	26 Penghargaan	247,519,700	247,519,700	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	100 persen	400,000,000
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>										<b>124,602,950</b>	<b>124,602,950</b>	<b>250,000,000</b>		
<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>										<b>124,602,950</b>	<b>124,602,950</b>	<b>250,000,000</b>		



Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan yang terselesaikan	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Dita	apJumlah otPaengaduan yang ditindaklanjuti ngani	100 persen	100 persen	30 Dokumen	30 Dokumen	100 persen	100 persen	124,602,950	124,602,950	Persentase Penanganan Pengaduan yang terselesaikan	100 persen	250,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>										<b>64,569,039,500</b>	<b>67,284,274,500</b>	<b>78,900,000,000</b>		
<b>Pengelolaan Sampah</b>										<b>64,569,039,500</b>	<b>67,284,274,500</b>	<b>78,900,000,000</b>		
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah sampah yang tertangani	99 Persen	99 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	174106.6 ton	174106.6 ton	150,000,000	150,000,000	Persentase pengelolaan persampahan	99 Persen	450,000,000
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan persampahan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang tertangani	99 Persen	99 Persen	140293.9 Ton	140293.9 Ton	174106.6 ton	174106.6 ton	58,919,039,500	61,634,274,500	Persentase pengelolaan persampahan	99 Persen	73,200,000,000

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah sampah yang tertangani	99 Persen	99 Persen	8 Kelompok	8 Kelompok	174106.6 ton	174106.6 ton	300,000,000	300,000,000	Persentase pengelolaan persampahan	99 Persen	250,000,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah sampah yang tertangani	99 Persen	99 Persen	15 Unit	15 Unit	174106.6 ton	174106.6 ton	5,200,000,000	5,200,000,000	Persentase pengelolaan persampahan	99 Persen	5,000,000,000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>										<b>3,379,940,000</b>	<b>3,607,472,000</b>		<b>1</b>	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>										<b>3,379,940,000</b>	<b>3,607,472,000</b>		<b>1</b>	
<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>										<b>3,379,940,000</b>	<b>3,607,472,000</b>		<b>1</b>	
Pengelolaan Kebun Raya	Persentase RTH yang dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas tutupan lahan yang menjadi tanggung jawab Kota	10,59 Persen	10,59 Persen	309.22 Ha	309.22 Ha	6802.43 hektar	6802.43 hektar	3,379,940,000	3,607,472,000	Persentase RTH yang dikelola	10,59 Persen	1
<b>TOTAL</b>										<b>3,379,940,000</b>	<b>3,607,472,000</b>		<b>1</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											12,225,787,341	13,116,864,341		12,500,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											12,225,787,341	13,116,864,341		12,500,000,000
Pengelolaan Sampah											12,225,787,341	13,116,864,341		12,500,000,000
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan persampahan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang tertangani	99 persen	99 persen	140293.9 Ton	140293.9 Ton	174106.6 ton	174106.6 ton	12,225,787,341	13,116,864,341	Persentase pengelolaan persampahan	99 persen	12,500,000,000
<b>TOTAL</b>											<b>12,225,787,341</b>	<b>13,116,864,341</b>		<b>12,500,000,000</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Perubahan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026. Dimana Renja Perubahan ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

Dalam Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 ini terdiri dari 10 program, 21 kegiatan dan 48 sub kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan - kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan disesuaikan. Baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DLH Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026, Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perubahan DLH tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan Perubahan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
2. Renja Perubahan DLH Tahun 2023 didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Ranwal/Rankhir RKPD Kota Balikpapan dan Renstra DLH);
3. Renja Perubahan akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

1. Seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2023 dengan efektif dan efisien;
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, maka seluruh aparatur DLH Kota Balikpapan secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023.

Balikpapan, 10 Agustus 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Balikpapan,



**SUDIRMAN DJAYALEKSANA**